



Kiai dan Kepala Desa

© Sabtu, 03 Maret 2018 04:30 WIB | Wasku | Page 4/10/2018



KORAN JAKARTA/ONES

Foto: koranJakarta/ones

A A A Pengaturan Font

Oleh Rizka Mufazzam
Luthfy

POPULER DI PERSPEKTIF

Ketormatan dan kewibawaan Kiai berasal dari diri sendiri. Penghormatan masyarakat lantaran sikap, karakter, perilaku, tata krama, cara hidup, dan kebijaksanaan sehari-hari, sehingga ini melahirkan penghormatan personal.

Berita dan informasi pengantaraan ulama atau kiai merembak. Ini tentu mencerminkan. Ada dugaan kasus pengantaraan tokoh agama merupakan bagian dari strategi politik pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Bila benar, sangat disayangkan karena kiai berperan bagi kehidupan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Orang Jawa menyebut ulama itu di hormati. Dia lebih sering disebut kiai. Clifford Geertz dalam *Javanese Kijail* menyebut, kiai produk pergulatan nilai-nilai keagamaan dan praktik kebudayaan lokal.

Dia sosok yang lahir karena identitas institusional (Zuhairi Misrawi, 2010: 34). Pada umumnya, kiai sebutan bagi orang yang mengerti keagamaan. Menurut Zamakhsari Dhotir, kiai sebagai gelar untuk ahli agama Islam yang memiliki atau meradi di pimpinan pesantren. Dia mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Dia dianggap ahli, saleh, dan penerbit tanpa mengharap imbalan. Pribadinya diarahkan pada kebaikan. Di sejumlah daerah terdapat beberapa sebutan kiai, misalnya alangan (Sunda), nun atau bendara (Madura), lengku (Aceh), dan buya di Mirangkatbau (Darul Aqsha, 2009: 118).

Orang Islam meyakini kiai memiliki keisma dan kepemimpinan keagamaan yang berpengaruh ke daerah maupun nasional. Misalnya, peran memaknai nasionalisme dalam konteks diintegrasikan bangsa, semangat kelompok keagamaan, atau masalah masalah yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kewibawaan kiai terutama ada di masyarakat pedesaan. Dalam buku *Nasionalisme Kiai: Kontribusi Sosial Berbasis Agama* (2007: 13) disebutkan Mansur Noor menganggap para kiai merepresentasikan elite keagamaan yang berperan besar dalam membentuk masyarakat religius.

Baca Juga :

[PR Kapolri Mendatang](#)

Beberapa studi sosial mengenai pemimpin/pemimpin Islam dikumpulkan. Kiai berposisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Buku *Perselingkutan Kiai dan Kekuasaan* (2004: 1) menambahkan, lantaran memegang kepemimpinan informal, kiai diyakini penduduk desa memiliki otoritas besar dan karismatis. Ketormatan dan kewibawaan kiai berasal dari diri sendiri. Penghormatan masyarakat lantaran sikap, karakter, perilaku, tata krama, cara hidup, dan kebijaksanaan sehari-hari, sehingga ini melahirkan penghormatan personal.

desa, tidak memperoleh penghargaan tersebut. Masyarakat tidak mungkin memformasi sedemikian rupa. Keleluhan yang tinggi berasal dari luar jabatan di pundaknya. Informalitas senantiasa melekat pada Kiai. Pemimpin lokal ini selalu terkesan informal, mulai dari cara berpakaian, tindak-tanduk, serta berbicara. Di satu sisi, cara ini menguntungkan lantaran memudahkan dalam berbagai situasi. Dia dapat mengondisikan diri dengan lingkungan, tanpa mengorbankan identitas dan jati diri. Dengan predikat Kiai, seseorang leluasa merangkul seluruh keperluan dan golongan masyarakat. Namun pada sisi lain, sebagian masyarakat menyalahkan kesan informal Kiai dengan arti literatur.

Kepala Desa

Tidak demikian dengan kepala desa yang terkesan formal. Peraturan negara membuatnya berakrab dengan masyarakat. Rapat yang digelar, materi pidato yang disampaikan, serta seragamnya menambah kesan tersebut. Bahkan kepala desa dianggap birokratis jika memfungsikan balai desa hanya sebagai kantor pelayanan publik. Dalam beberapa situasi, kepemimpinannya bercorak saklek dan prosedural. Sejak masa Kralaan, era kolonial, hingga Orde Baru, kepala desa merupakan kaid tangan penguasa yang bertugas merealisasikan program-program pemerintah.

Sejak dulu kala, peraturan perundang-undangan tentang desa menetapkan peran strategis kepala desa. Dalam menjalankan kewajibannya, kepala desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ia seakan menempatkan diri selaku petugas resmi pemerintah. Dalam upaya memajukan wilayah, pemertasaan dan menyelenggarakan masyarakat, negara memberinya dasar yang jelas. Kepala desa mempunyai pijakan normatif dalam melaksanakan tugas. Perak tekadnya dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan peran yang telah digariskan. Legitimasi kekuasaannya bersifat bottom-up dari rakyat.

Pengakuan atas kepemimpinan berdasarkan tradisi masyarakat. Komunalitasnya berasal dari bawah, sehingga jauh dari kesan kosmopolit. Tidak ada intervensi dan campur tangan pemerintah dalam pengangkatan Kiai. Masyarakat memberikan masi kepada seseorang yang. Boleh dibayar, negara enggan memberikan perogasan terhadap keberadaannya, terutama dalam produk legal. Adapun proses pemilihan kepala desa berlangsung secara demokratis. Pemilihan langsung yang melibatkan semua lapisan menandai proses tersebut.

Eksistensinya didukung pemerintah. Legalitas mendasari setiap kebijakan yang dikeluarkan, selama tidak menyalaiki kode etik karena mendapat pengakuan dari Negara. Kekuasaannya terkesan bersifat top-down. Sebelum peraturan perundang-undangan dibuat demi ketenangan terhadap posisi kepala desa. Peran Kiai bersifat tradisional. Fungsinya merupakan warisan pemikiran lama yang masih laitari. Konsensus menentukan tugas Kiai bersifat kondisional, dikendalikan oleh perubahan zaman. Realitas sosial menjadi pijakan atas misi yang diemban.

Baca Juga : [Kepemimpinan Transaksional](#)

Apa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh mereka. Kiai dapat berperan dalam bidang agama, sosial, politik, bahkan medis. Dalam bidang agama, Kiai memerankan diri sebagai imam shalat maktubah, muballigh, imam tahjib, dan khatib shalat Jumat atau shalat Ied. Dalam bidang sosial, Kiai dipercaya memberi arahan tentang calon pasangan hidup, memberi nama bayi, memimpin ritual slametan dan penyempal maksud hajat. Dalam bidang politik, dia berpengaruh menentukan calon bupati, calon presiden dan calon legislator. Konsultasi mengenai partai politik juga diserahkan kepada Kiai. Dalam bidang medis, sebagian Kiai dinilai sanggup mengobati pasien dengan pengobatan alternatif.

Penulis Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UIJ



Berita Terkait

[Lihat Lainnya >](#)

Komentar

Nama

Email

Berikan Komentar

Submit

0 Komentar ()

[Muat lainnya](#)

